

PENATAAN RUANG PERKOTAAN DI GRESIK MASA PEMERINTAHAN BUPATI SAMBARI HALIM RADIANTO TAHUN 2010-2020

Muhammad Sulaiman; Nurhadi Sasmita ([SINTA ID: 6663464](#))

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

muhsulaiman96@gmail.com nurhadisasmita.sastra@unej.ac.id.

ABSTRACT

This study discusses Urban Spatial Planning in Gresik during the Government of Sambari Regent Halim Radianto 2010-2020. The research problem is what are the factors that cause the need for structuring the city of Gresik, how is the process of urban spatial planning in Gresik, and what are the efforts of the Regent of Sambari Halim Radianto in managing and organizing urban space in Gresik in 2010-2020. Historical methods are used for the reconstruction of events, which include heuristics, criticism, interpretation and historiography. Sources of study come from archives, reports, books, journals, and other relevant research works. The theory used is the theory of spatial planning. The results showed that the initial arrangement of Gresik City was under the leadership of the Regent of Soefelan in 1973-1978, by relocating the government center, the regent's official house, and all existing agency offices. The next urban arrangement was carried out by the Regent Robbach Ma'sum in 2000-2010, by dividing the urban settlement system according to the hierarchy and function of the city. The hierarchy is divided into three parts, City of Order I, City of Order II, and City of Order III. In 2010, Sambari Halim Radianto was elected regent, then reorganized the city. Structuring the city by moving the DPRD Building, Mapolres, and building a Public Service Mall for public service purposes. The Regent of Sambari also made a landmark as the identity of Gresik City. The landmark is the Lontar Monument which is located in Putat Luar, Sukorame. The second is the Gajah Mungkur Monument which is located at the corner of the Sukorame intersection. Third, the Flute Substation Tower Monument which is located in Pulo Pancikan, Kec. Gresik. Fourth, is the Keris Sumilang Gandring Monument. The results showed that the arrangement of Gresik City was carried out during the Regent of Sambari. Urban planning is useful for increasing the attractiveness of the city and improving the community's economy

Keywords: Gresik, City Planning, Landmark, Sambari Halim Radianto.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Penataan Ruang Perkotaan di Gresik Masa Pemerintahan Bupati Sambari Halim Radianto Tahun 2010-2020. Permasalahan penelitian adalah apa faktor yang menyebabkan perlunya penataan Kota Gresik, bagaimana proses penataan ruang kota di Gresik, dan apa upaya Bupati Sambari Halim Radianto dalam mengelola dan menata ruang kota di Gresik tahun 2010-2020. Metode sejarah digunakan untuk rekonstruksi peristiwa, yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber kajian berasal dari arsip, laporan, buku, jurnal, dan karya penelitian lainnya yang relevan. Terori

yang digunakan adalah teori perencanaan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penataan Kota Gresik awalnya pada kepemimpinan Bupati Soefelan tahun 1973-1978, dengan melakukan pemindahan pusat pemerintahan, rumah dinas bupati, dan seluruh kantor instansi yang ada. Penataan kota selanjutnya dilakukan oleh Bupati Robbach Ma'sum tahun 2000-2010, dengan membagi sistem permukiman perkotaan sesuai dengan hirarki dan fungsi kota. Herarki dibagi atas tiga bagian, Kota Orde I, Kota Orde II, dan Kota Orde III. Tahun 2010, Sambari Halim Radianto terpilih menjadi bupati, kemudian kembali melakukan penataan kota. Penataan kota dengan memindahkan Gedung DPRD, Mapolres, dan membangun Mall Pelayanan Publik untuk keperluan pelayanan masyarakat. Bupati Sambari juga membuat landmark sebagai identitas Kota Gresik. Landmark tersebut adalah Tugu Lontar yang terletak di Putat Luar, Sukorame. Kedua adalah Tugu Gajah Mungkur yang terletak di sudut perlimaan Sukorame. Ketiga, Tugu Menara Gardu Suling yang terletak di Pulo Pancikan, Kec. Gresik. Keempat, adalah Tugu Keris Sumilang Gandring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan Kota Gresik dilaksanakan masa Bupati Sambari. Penataan kota berguna untuk meningkatkan daya tarik kota dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Penataan Kota, Landmark, Sambari Halim Radianto, Gresik

PENDAHULUAN

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berada pada tingkat budaya menetap. Dalam menjalani kehidupan manusia membutuhkan tempat tinggal. Keadaan ini penting dan sangat diperlukan dalam kelompok manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kebudayaannya. (Purnawan Basundoro, 2001: 135). Sebagai sebuah kota yang dinamis penduduk Gresik juga cukup padat. Pada tahun 1845 kepadatan penduduk Gresik mencapai 6.876 jiwa per kilometer persegi. (Purnawan Basundoro, 2001: 135). Sebagian besar kota terutama kota-kota besar di kawasan pantai, dihadapkan pada peningkatan jumlah penduduk yang pesat, permintaan yang tinggi terhadap perumahan dan berbagai kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan pemukiman yang khusus dihuni oleh para orang-orang Eropa. Mereka membentuk pemukiman baru di sekitar wilayah penduduk asli kawasan tersebut (Pauline K.M. van Roosmalen, 2003: 9). Gresik pada akhir abad 19 hingga awal abad 20 memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian di Hindia Belanda karena menjadi kota pelabuhan di pesisir utara Jawa. Gresik merupakan wilayah pesisir pantai dengan panjang 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang dari Distrik Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sedayu, Ujungpangkah, Tjermee dan Panceng. (Wildatul Risqiana, 2021: 5).

Kondisi tersebut juga mendukung perkembangan kawasan pusat Kota Gresik yang sebelumnya hanya digunakan sebagai pusat pemerintahan, kemudian berkembang menjadi lebih kompleks dengan dibangunnya fasilitas- fasilitas modern. Menurut Robert Pickard, dalam Konverensi Granada, heritage dalam arsitektur terbagi menjadi 3 kelompok yaitu monumen, bangunan, dan sebuah kawasan lingkungan yang memiliki daya tarik dalam hal sejarah (Robert Pickard, 2014: 2) Pemikiran tentang penataan ruang di Indonesia timbul pada awal abad 20 dan merupakan hasil perubahan administrasi yang ditetapkan dalam Undang- undang Desentralisasi (Decentralisatiewet). Undang-undang yang ditetapkan pemerintah pada 1903 ini mengenalkan klasifikasi administrasi baru yang mengakhiri administrasi pusat yang terlalu

berkuasa di Batavia. Hal ini membuka jalan untuk diberlakukan Ordonansi Dewan Lokal (*Locale Radenordonnantie*) yang menetapkan peraturan bagi pembentukan pemerintahan lokal. Pemerintah lokal atau kotamadya (*gemeenten*) inilah yang akan menangani pengembangan dan perencanaan wilayah lokal. Langkah ini merupakan langkah awal menuju penataan ruang. (Sutjipto Tjiptoatmodjo, 1983: 112).

Kebijakan penataan ruang dimulai sejak zaman Kolonial Belanda dengan terbitnya *Stadsvorming Ordonnantie* (SVO), *Stadsblad* No. 168 Tahun 1948 atau Undang-Undang Pembentukan Kota, yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu *Stadsvormingverordening* (SVV), *Stadsblad* No. 40 Tahun 1949 atau Peraturan Pembentukan Kota. Pasca kemerdekaan baru disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pokok-Pokok Bina Kota yang dimulai pada tahun 1970. (Pauline K.M. van Roosmalen, 2003: 10). Kehadiran industri besar di Kecamatan Kebomas terjadi sejak tiga dekade, ditandai dengan berdiri PT. Semen Gresik pada tahun 1953. PT. Petrokimia Gresik pada tahun 1992 berdiri di Kecamatan Gresik, yang mana dapat menstimulasi berkembangnya ruang kota. Hal ini memicu pusat perdagangan dan sarana publik lainnya mendekati ruang industri tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat urbanisasi yang kian meningkat menjadikan kedua wilayah ini menjadi sentra pembangunan. (Purnawan Basundoro, 2001: 135).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Gresik Tahun 2010-2030, menunjukkan bahwa Gresik ingin memperkuat *image* sebagai kota lama. Kawasan pariwisata di Kabupaten Gresik dikelompokkan menjadi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Dengan mengedepankan potensi-potensi wisata berupa objek wisata, atraksi wisata, dan nilai historis. Sebaran pariwisata budaya meliputi Wisata Budaya Gresik Kota dan Pulau Bawean. (Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Gresik 2011- 2030). Di beberapa sudut kota, dibangun *landmark* atau monumen untuk mengenang kota lama. Misalnya *landmark* Keris Kanjeng Sepuh, Tugu Lontar, Patung Gajah Mungkur dan *landmark* Garling (Gardu Suling atau menara sirine). Dalam pembangunan dan penamaannya tidak lepas dari sejarah atau peristiwa penting yang pernah terjadi di Gresik. Narasi pelestarian warisan budaya masih menarik untuk diceritakan ulang. Saat kota-kota di Indonesia mulai memperhatikan keberadaan bangunan bersejarah dan kawasan cagar budaya. Banyak rumah kuno serta bangunan bernilai sejarah yang terbengkalai dan tak terawat di Gresik. Pemerhati sejarah Gresik, Oemar Zainuddin mengungkapkan, jika pemerintah daerah harus serius mengelola cagar budaya. Caranya maka banyak bangunan dan rumah tua harus di revitalisasi.

Kajian yang telah ada oleh Pauline K.M. van Roosmalen, yang berjudul “Sejarah Penataan Ruang di Indonesia”. Roosmalen membahas tentang perjalanan tata ruang di Indonesia sejak kolonial hingga akhir abad ke-20. Roosmalen menerangkan bahwa awal penataan tata ruang di Indonesia di mulai sejak tahun 1903. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatiewet*). Undang-undang Desentralisasi ini membagi administrasi baru yang mengakhiri kewenangan administrasi pusat yang begitu luas. Secara komprehensif memaparkan tentang perjalanan penataan ruang kota yang terjadi di Indonesia. Tata ruang kota juga didasarkan pada kondisi permasalahan yang timbul di kota tersebut, misalnya kota-kota besar yang berada di kawasan pantai seperti Semarang. Kota ini memiliki permasalahan yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang semakin pesat, permintaan yang tinggi terhadap perumahan dan berbagai kebutuhan. Atas adanya permasalahan ini, para dewan

kota berusaha menangani permasalahan tersebut. Konteks di Kota Semarang pembangunan tata ruang kota dimulai dengan pembuatan sketsa perluasan daerah berbukit di selatan Semarang, rencana ini muncul pada tahun 1907. Kota lain seperti Surabaya pada tahun 1909, dewan melakukan pembebasan lahan di Gubeng untuk lingkungan Eropa yang baru. Pada tahun 1916, dewan kota membeli lahan Ketapang dan Ngagel untuk keperluan yang sama. Tahun 1910, Dewan Kota Bandung juga ikut memperluas wilayahnya. Tahun 1917, kota lain seperti Batavia, Buitenzorg dan Medan juga mengajukan perluasan wilayahnya masing-masing. (Pauline K.M. van Roosmalen, 2003: 9) Karya selanjutnya yakni dari Purnawan Basundoro dalam buku yang berjudul *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Surabaya 1900-1980*- an. Purnawan Basundoro secara komprehensif mengulas dinamika perjuangan rakyat miskin Kota Surabaya. Buku ini membahas tentang perjuangan rakyat miskin dalam memepertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup mereka di Surabaya. Pertarungan ini terjadi karena beberapa hal, pertama, sejak dibentuk sebagai gementee di zaman kolonial, Surabaya tidak memiliki perencanaan ruang dan wilayah sebagai kota bumiputera. Pembangunan Surabaya sengaja dikhususkan hanya sebagai kota untuk kolonial. Kepentingan masyarakat secara umum, terutama soal urusan pemukiman, menjadi dikesampingkan dalam perencanaan kota. Pemerintah kolonial Belanda tidak mengantisipasi potensi ledakan penduduk yang akan membanjiri Surabaya seiring statusnya sebagai kota besar. Akibatnya masyarakat pribumi “melawan” dengan cara memenuhi kebutuhannya secara “mandiri” tanpa menggantungkan diri dan menunggu kebaikan hati pemerintah kolonial. Mereka menghuni setiap tempat kosong yang bisa ditinggali dan membentuk perkampungan-perkampungan rakyat di berbagai sudut Kota Surabaya. (Purnawan Basundoro, 2001: 5).

Kajian selanjutnya adalah *Sejarah Kota Denpasar Tahun 1945-1979*, yang merupakan karya dari Anak Agung Gde Putra Agung, I Gde Parimartha, Ida Bagus Gde Budharta, dan Ida Bagus Rama. Karya ini membahas tentang sejarah Kota Denpasar secara menyeluruh. Pembahasan ini terbagi atas beberapa bagian, pertama mengenai lingkungan Kota Denpasar. Hal ini meliputi geografi kota, demografi, penduduk, mobilitas sosial. Komunikasi, dan juga transportasi yang berkembang di Kota Denpasar. Bagian kedua tentang struktur kota yakni perkembangan tata kelola kota, Denpasar sebagai Kota Kerajaan, Denpasar sebagai Kota Kolonial, Denpasar sebagai pusat pemerintahan, Denpasar sebagai kota republik, serta perkembangan lain seperti ekonomi, jaringan jalan, dan juga pendidikan di Kota Denpasar. Bagian ketiga membahas kehidupan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Dan yang terakhir, membahas mengenai perkembangan Kota Denpasar sebagai pusat Pariwisata. (Anak Agung Gde Putra Agung, 1996: 7).

Karya selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan Gresik. Karya pertama yakni penelitian yang berjudul “*Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik*”. Purnawan Basundoro menjelaskan kehadiran industri-industri besar di kota berskala kecil seperti kota Gresik membawa dampak yang sangat besar bagi keberadaan kota tersebut dan bagi masyarakatnya. Kota Gresik yang mulanya wilayahnya hanya terbatas di kawasan alun-alun, meluas ke berbagai arah akibat adanya industri. Sebagai contoh misalnya, Gresik meraih kembali statusnya yang pernah hilang, yaitu status sebagai kota kabupaten. Berdasarkan SK Mendagri No. 38/1974, status kabupaten Surabaya dihapus dan sebagai pengantinya berdirilah Kabupaten Gresik. (Purnawan Basundoro, 2001: 135).

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini membahas secara lebih Penataan Ruang Perkotaan di Gresik Masa Pemerintahan Bupati Sambari Halim Radianto Tahun 2010-2020. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan perlunya penataan Kota Gresik? (2) Bagaimana proses penataan ruang kota di Gresik? (3) Apa upaya Bupati Sambari Halim Radianto dalam mengelola dan menata ruang kota di Gresik tahun 2010-2020? Kajian ini bertujuan:(1) Mendeskripsikan faktor-faktor perlunya penataan Kota Gresik (2) Mengetahui proses penataan ruang perkotaan di Gresik. (3) Menjelaskan upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam menata kota Gresik tahun 2010-2020. Ruang lingkup tulisan ini terdiri atas ruang lingkup spasial dan temporal. Lingkup spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gresik. Lingkup spasial penelitian ini adalah wilayah Gresik. Alasan pengambilan wilayah Gresik karena pada tahun 2012 Kabupaten Gresik menerima piala Adipura Bangunpraja sebagai lambang spremasi kebersihan kota yang kelima kalinya untuk kategori Kota Sedang. Pembatasan ruang lingkup waktu (*scope temporal*) pada penelitian ini adalah tahun 2010- 2020. Alasan pengambilan tahun 2010 adalah karena masa pemerintahan Sambari Halim Radianto dimulai pada tahun tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang melantik Sambari Halim Radianto bersama wakilnya Muhammad Qosim, pada hari senin tanggal 27 September 2010. Pada pilkada 2015, Sambari Halim Radianto kembali terpilih dan melanjutkan periode ke dua. Sambari Halim Radiyanto-M Qosim resmi kembali menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Gresik setelah dilantik Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Grahadi, Surabaya pada hari rabu, tanggal 17 Februari 2016. Penelitian ini diakhiri tahun 2020 karena berakhirnya kekuasaan atau masa jabatan Sambari Halim sebagai bupati Gresik.

METODE PENELITIAN

Menurut Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. (Gottschalk, 1985: 32). Proses ini meliputi empat tahapan, yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik adalah tahapan pertama dalam penulisan sejarah yaitu tahapan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang mendukung penulisan sejarah. Di dalam mencari suatu dokumen atau data harus disesuaikan dengan judul tulisan atau masalah yang ingin dibahas. Berdasarkan masalah yang dibahas tentang Penataan Ruang Perkotaan di Gresik Masa Pemerintahan Bupati Sambari Halim Radianto Tahun 2010-2020. Sumber primer yang didapatkan berupa arsip daerah, RTRW Gresik 2010-2030, foto-foto, dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Sumber sekunder juga merupakan tahap penunjang dari dari sumber primer. Bentuk sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur berupa buku yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Universitas Ilmu Budaya, ruang baca Jurusan Sejarah dan melakukan pencarian melalui internet berupa jurnal-jurnal ilmiah, skripsi dan tesis terdahulu dengan tema yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tahap kedua, Kritik sumber merupakan tahapan menguji sebuah sumber yang ditemukan yang mana termasuk pula, apakah sumber yang diperoleh asli atau palsu dan apakah isinya dapat dipercaya atau tidak. Selain mengkritik sumber perlu pula dilakukan penyeleksian terhadap sumber itu sendiri. (Mohamad Hadi Sundoro,2013: 30). Kritik ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik yang dilakukan dari dalam

sumber sehingga di dapatkan data yang benar-benar dapat dipercaya (otentik). Kritik ekstern adalah kritik dari luar sumber untuk membuktikan data yang terkandung dalam sumber. (Kuntowijoyo, 2003 :220).

Metode yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan sebuah usaha untuk melakukan pemahaman terhadap data valid yang telah didapatkan dalam penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan perlu dipahami agar dapat dihubungkan dengan sumber yang lain. Cara menghubungkan data-data ini agar mendapatkan korelasi yang baik maka menggunakan 6 prinsip pertanyaan, yaitu 5W + 1H.

Interpretasi merupakan sebuah usaha untuk melakukan pemahaman terhadap data valid yang telah didapatkan dalam penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan perlu dipahami agar dapat dihubungkan dengan sumber yang lain. Cara menghubungkan data- data ini agar mendapatkan korelasi yang baik maka menggunakan 6 prinsip pertanyaan, yaitu 5W + 1H.

Keempat adalah Historiografi. Historiografi merupakan cara untuk merekonstruksi suatu kesaksian atau kisah lampau berdasar sumber yang diperoleh. (Mohamad Hadi Sundoro, 2013: 30). Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam tahap penulisan sejarah dengan hasil berupa karya sejarah. Historiografi ini bertujuan untuk menyajikan karya sejarah yang mana dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Gresik

Gresik terletak pada titik 7° 9',45", Lintang Selatan dan 112° 38',43" Bujur Timur. Gresik sebagai daerah kabupaten secara geografis berada antara 112° sampai 115' Bujur Timur dan 7° sampai 8' Lintang Selatan dengan luas Wilayah 1,174,07 km² yang mencakup daratan di Pulau Jawa seluas 977,80 km². adapun batas-batas wilayah Gresik yakni sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Selat Madura, di sebelah selatan Sidoarjo dan Mojokerto, di sebelah barat Lamongan. Gresik terdiri atas beberapa distrik yaitu: sebelah utara terdiri dari Distrik Panceng, Distrik Ujungpangkah, Distrik Dukun, dan Distrik Sidayu. Sebelah tengah terdiri dari Distrik Kalitengah, Distrik Karangbinangon, Distrik Bongah, Distrik Glagah, Distrik Manjar, Distrik Dukuksampean, Distrik Gresik, dan Distrik Kebomas. Sebelah selatan terdiri dari Distrik Cerme, Distrik Benjeng, dan Distrik Balongpanggang.

Letak geografis Kota Gresik di Pantai Utara Pulau Jawa, sebagian wilayahnya yang terdiri dari tanah tandus, gersang dan berbukit- bukit kapur keras, tidak memungkinkan penduduk Gresik menjadi masyarakat agraris. Pertanian padi dan sayur-mayur yang membutuhkan tanah yang cukup berair tidak akan tumbuh di Gresik. Para petani ladang bercocok tanam jenis tanaman kering yakni buah mangga, jambu, dan pisang yang bisa tumbuh di Gresik. Hal inilah yang mendorong penduduk Gresik bermata pencaharian sebagai pengrajin dan pedagang.

Gresik sebagai kota pelabuhan yang terbuka, dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis, namun kehidupan masyarakat berjalan rukun dan damai. Sebagian besar mereka hidup berkelompok dalam satu lokasi yang dihuni oleh sesama etnis. Etnis Arab bertempat tinggal di Kampung Gapuro dan Pulopancikan. Etnis Cina bermukim di Kampung Pecinan (sebelah timur

Alun-alun). Di tengah kota terdapat Alun-alun yang dikelilingi pohon-pohon asem. Di sebelah selatan, barat dan utara Alun-alun berdiri gedung-gedung pemukiman orang Eropa salah satunya adalah tempat tinggal asisten residen. Di sekitar pelabuhan berdiri kantor-kantor dan gudang antara lain kantor cukai, sedangkan orang Madura menyebar di sekitar pantai dekat pelabuhan. Orang-orang Madura yang mendiami wilayah Gresik tergolong cukup besar.

Asal Mula Penyakit Lepra di Gresik

Pada kepemimpinan Bupati Soefelan tahun 1973-1978 terjadi perubahan penataan di Lingkungan Kabupaten Gresik. Bupati Soefelan melakukan pemindahan pusat pemerintahan, rumah dinas bupati, dan seluruh kantor instansi yang ada. Kantor Pemda Gresik setelah dipindah menempati gedung eks Markas Komando Distrik Militer Gresik di Jalan Basuki Rahmat. Rumah dinas bupati, awalnya menempati gedung yang sekarang digunakan Gedung DPRD, kemudian dilakukan pemindahan di Kompleks Pendapa Kabupaten, yang mana sebelumnya merupakan Rumah Sakit Umum Gresik.

Peningkatan jumlah penderita lepra di Batavia terakhir kali disebutkan pada tahun 1688, tetapi di Ambon (Maluku) sekitar 1700 penderita masih bertambah. Hindia Belanda sejak tahun 1920 sudah terdapat beberapa macam penyakit yang menyebabkan kematian pada pasien. Penyakit tersebut antara lain; malaria, pes, TBC, lepra, Sipilis dan lain sebagainya. Perkembangan infrastruktur kota yang cepat berdampak pada meluasnya wilayah kota di Kabupaten Gresik. Kawasan Kebomas yang dulu merupakan hutan, kemudian menjadi kawasan yang ramai, bahkan terus berkembang hingga ke daerah Bunder. Kota Gresik juga berkembang semakin dinamis sehingga kompleks perkantoran yang berada di sekitar alun-alun dirasakan semakin sempit. Rumah Sakit Umum Gresik akhirnya dipindah ke Bunder.

Pemindahan kantor pemda Gresik di Bunder selain sebagai dampak dari industrialisasi, juga dapat menyelamatkan Kabupaten Gresik menjadi kota mati. Hal ini disebabkan karena dengan berfungsinya jalan tol Surabaya-Gresik, diperkirakan Gresik akan menjadi kota yang hilang. Selanjutnya, terminal Gresik juga dipindahkan ke Bunder. Terminal semula berada di Jalan Veteran. Pemindahan terminal ini menjadukan kota Gresik terbelah menjadi dua kawasan, yakni kawasan kota Gresik lama dan kota Gresik baru yang merupakan kota yang benar-benar tumbuh karena industrialisasi.

Pada masa Bupati Robbach Ma'sum orientasi kebijakan lebih menekankan pada dua bagian yakni membangun kualitas keberagaman dan kemajuan kebudayaan masyarakat. Pembangunan ini termasuk dalam sektor keagamaan. Konsep yang diberikan oleh bupati Robbach Ma'sum yaitu tentang "Kota Budaya". Kota Budaya ini mengarah pada peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya, untuk mewujudkan masyarakat Gresik sebagai masyarakat berbudaya dengan menjunjung tinggi kualitas keberagaman masyarakat.

Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2004 S/D 2014. Rencana tata ruang wilayah dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal, yakni (a) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; (b) Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah; (c) Rencana umum tata ruang wilayah; dan (e) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Gresik meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, permukiman kawasan perbatasan dan permukiman kawasan tertentu serta sarana dan prasarana permukiman. Pengembangan permukiman perdesaan diarahkan pada penggunaan lahan pertanian yang dapat dialihkan yaitu lahan pertanian yang tidak produktif. Kriteria tersebut yaitu bukan pada sawah irigasi teknis; dikelompokkan pada lokasi permukiman yang sudah ada; Terkait dengan lahan usaha; kecenderungan perkembangan existing; dan lahan memiliki keterkaitan dengan pusat pertumbuhan daerah sekitar.

Kebijakan Pemerintah Bupati Sambari Halim Radianto dalam Menata Ruang Kota di Gresik

Bupati Sambari Halim Radianto sebelum memasuki dunia politik di Kabupaten Gresik, ia merupakan seorang akademisi dan pengusaha. Bupati Sambari Halim Radianto mengawali karir politiknya sebagai wakil bupati sejak tahun 2000 hingga tahun 2005. Sambari merupakan wakil dari Bupati Robbakh Ma^{''}sum kala itu. Pada tahun 2005, Sambari mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik sebagai Calon Bupati Gresik. Pada pilkada ini, Sambari mengalami kekalahan. Pemenang pilkada 2005 adalah KH Robbakh Ma^{''}sum dengan wakilnya Sastro Suwito.

Pada awal jabatannya, Bupati Sambari Halim Radianto langsung percepatan program 100 hari pasca pelantikan yaitu, penataan Kabupaten Gresik, penanggulangan banjir kota, peningkatan sarana dan prasarana olah raga di kecamatan, program peningkatan pelayanan masyarakat Pulau Bawean dan peningkatan pelayanan penyeberangan kapal. Program 100 hari Bupati Sambari Halim Radianto berkaitan dengan pembangunan Wahana Ekspresi Poeponegoro (WEP). Tujuan pembangunan WEP oleh Bupati Sambari Halim Radianto untuk memberikan sarana dan prasarana publik yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Makna pribadi bagi Bupati Sambari Halim Radianto terhadap pembangunan WEP adalah merasa bahagia, senang, dan bersyukur karena pembangunan WEP tidak sia-sia dan bermanfaat bagi masyarakat Gresik.

Pada masa Bupati Sambari Halim Radianto tentu terdapat rumusan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Gresik. Rencana tata ruang wilayah ini termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Pada dasarnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. Selanjutnya, tata ruang kecamatan berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan (RDTRK) yang bertujuan untuk penataan secara lokal di wilayah kecamatan.

Bupati Sambari Halim Radianto membagi potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Gresik menjadi empat bagian. Pertama, Wilayah Gresik Utara untuk pengembangan agropolitan (mangga), industri pengelolaan dolomit, minapolitan (bandeng dan udang), kawasan agroindustri dan industri manufaktur, dan pariwisata pantai dalegan. Kawasan kedua, Wilayah Gresik Kota yang digunakan untuk industri makanan, industri garmen (busana muslim), industri handycraft, industri pariwisata budaya, kawasan industri. Kawasan ketiga adalah Wilayah Gresik Selatan digunakan untuk industri mamin berbasis TOGA, industri pengolahan berbasis peternakan, industri tekstil (sarung ATBM), industri pengolahan rotan, dan industri agrobisnis (tanaman hias). Kawasan keempat adalah Wilayah Bawean yang

berguna untuk industri pariwisata, industri pengolahan ikan (krupuk), industri kerajinan anyaman pandan, industri pengolahan aren, kelapa (gula merah, minyak kelapa).

Membangun Penanda Kota (*Landmark*)

Bentuk kota menjadi indikator tingkat budaya serta peradaban manusia dalam suatu lini masa. Bentuk arsitektur kota dapat mempresentasikan sebuah kota memiliki berbagai elemen fisik yang membentuk wajah atau citra kota yang kemudian mencerminkan juga identitas arsitektural kota tersebut. Identitas tersebut merepresentasikan identitas kolektif secara keseluruhan yang dapat memberikan nilai karakter, dan membedakannya dengan kawasan yang lain. Selain itu identitas sebuah kota secara keseluruhan juga mencerminkan sebagian proses kultural dan karakter perilaku manusia yang tinggal pada kota tersebut. Identitas kota yang ada inilah lazim disebut dengan *landmark* (identitas kota). Setiap kota tentu memiliki *landmark* kota masing-masing. Hal ini juga berlaku dengan Kabupaten Gresik. Dalam rangka membentuk *landmark* kota, Bupati Sambari Halim Radianto melakukan beberapa pembangunan dan perbaikan yang berkaitan dengan *landmark* tersebut.

Landmark pertama adalah Tugu Lontar yang terletak di Putat Luar, Sukorame, Kecamatan Gresik. Tugu Lontar ini diresmikan pada 7 Agustus 2019 pada pukul 20.30 WIB, Tugu Lontar memiliki tinggi 11,8 meter yang merupakan hibah dari PT Smelting Gresik sebuah perusahaan smelter asal negara Jepang. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyampaikan bahwa tugu ini mempunyai karakter dari sisi desain, yakni desain tersebut mencerminkan bersatunya dua peradaban besar, yakni negara Jepang dan Indonesia. Desainnya mengandung unsur kerajinan daun lontar yang telah mentradisi sejak dahulu kala di Bumi Gresik, bahkan daun lontar digunakan juga sebagai media tulis, sedangkan unsur seni origami merupakan seni asli Jepang. Warna emas metalik merupakan simbol kemajuan peradaban, serta kemakmuran sebuah bangsa.

Landmark yang kedua adalah Tugu Gajah Mungkur yang terletak di sudut perlimaan Sukorame, Gresik. Ada dua sudut tempat *landmark* ini dibangun. *Landmark* pertama ada di sudut belokan Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Usman Sadar. *Landmark* kedua ada di sudut atau jalan antara Jalan Dr. Soetomo dan Jalan Proklamasi. Posisi kedua gajah itu pun juga berbeda. Gajah di *landmark* pertama posisinya membelakangi (memungkuri) jalan, sementara gajah di *landmark* kedua menghadap ke arah jalan. *Landmark* gajah pertama ber-*background* rumah *heritage* Gajah Mungkur, sedangkan *landmark* gajah kedua ber-*background* taman. Patung tersebut memperlihatkan sebuah bentuk gajah dengan empat kaki yang disatukan atau bersambung menjadi dua. Patung itu masih memperlihatkan bentuk gajah karena masih ada penampakan belalainya.

Landmark ketiga adalah, Tugu Menara Gardu Suling yang terletak di Pulo Pancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik. Tugu Menara Gardu Suling merupakan *heritage* dari Gardu Suling yang terletak di Gardu Suling terletak di Pertigaan Jalan Raden Santri, HOS Cokroaminoto dan Jalan Basuki Rahmat (tepat di depan kantor PLN). Gardu suling merupakan cagar budaya Kabupaten Gresik.

Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan di Gresik

Berdasarkan Survey oleh lembaga riset The Republic Institute tentang Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto dan Wabup Moh. Qosim, menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang menyatakan puas atas kepemimpinan

bupati 86,3 persen dan tidak puas 13,7 persen untuk kinerja Bupati Gresik. Persepsi publik untuk kinerja wakil Bupati Gresik menunjukkan kepuasan untuk Wabup mencapai 88,8. Founder lembaga riset tersebut adalah Sufyanto yang merupakan peneliti juga alumnus doktor FISIP Unair. Riset tersebut dilakukan dengan menggunakan 800 responden dengan margin of error 3,2 persen.

Hasil riset terbaru The Republic Institute juga tidak jauh berbeda dengan penelitian Pusdeham. Pusdeham memaparkan bahwa tingkat kepuasan atas kinerja Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto- Wabup Moh. Qosim juga relatif tinggi. Yakni, 70,2 persen. Jika diperinci, tingkat kepuasan pada pendidikan 85,6 persen; kesehatan 82,9 persen; infrastruktur 78,3 persen; tata kelola birokrasi 74,7 persen; pemberdayaan perempuan 72,4 persen; dan UMKM 71,8 persen. Berdasarkan adanya hasil survey persepsi publik tersebut, menunjukkan bahwa respons masyarakat di Kabupaten Gresik sangat baik terhadap kinerja Sambari Halim Radianto dan M. Qosim.

Bupati Sambari Halim Radianto memimpin Kabupaten Gresik sejak tahun 2010- 2020 telah melakukan berbagai pembangunan dan pengembangan di Gresik. Pembangunan tersebut salah satunya *Landmark* Tugu Gajah Mungkur. Pasca peresmian *Landmark* Tugu Gajah Mungkur menuai banyak respon dari masyarakat di Kabupaten Gresik. Respon tersebut ada yang bersifat negatif seperti mempertanyakan bentuk patung gajah yang tidak seperti gajah pada umumnya. Hal ini disebabkan karena bentuk gajah tidak memiliki mata, telinga, dan gading. Respon negatif ini kemudian segera terselesaikan setelah Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi mengenai bentuk patung tersebut.

Bupati Sambari Halim Radianto juga melakukan pembangunan yang lain seperti perbaikan Alun-alun Gresik. Adanya perbaikan Alun-alun Gresik, masyarakat sangat merespon dengan baik. Hal ini terlihat pada peningkatan pengunjung di wilayah Alun-alun Gresik. Masyarakat merasa lebih nyaman menikmati suasana Alun-alun Gresik yang terkesan lebih pada suasana religius. Kondisi ini juga didasarkan pada letak Alun-alun Gresik yang berada di depan Masjid Jami', dan berada di dekat Makam Maulana Malik Ibrahim

Pada akhir tahun 2016 Bupati Gresik Sambari Halim Radianto didaulat sebagai penerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi pemerintah pusat atas upaya pemerintah kabupaten Gresik dalam membina dan mengembangkan kabupaten Gresik menjadi kabupaten yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Reward ini diberikan, setelah Kabupaten Gresik melewati penilaian sebagai salah satu daerah yang peduli terhadap penegakan nilai-nilai HAM sepanjang tahun 2015. Kemenkum HAM melakukan penilaian atas 5 (lima) indikator utama, seperti hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak perempuan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly kepada Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto saat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-68 yang berlangsung di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis 8 Desember 2016.

Tahun 2018, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto menerima penghargaan pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik sosial tingkat Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Penghargaan tersebut diterima Bupati dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat Upacara apel siaga HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-68 dan Satuan Perlindungan Masyarakat

(Satlinmas) ke-56 tahun 2018 Jawa Timur, Senin (19/3/2018). Upacara apel siaga HUT Satpol PP dan Satlinmas di Jawa Timur tahun ini terpusat di Halaman Kantor Bupati Gresik.

Tahun 2019, Bupati Sambari Halim Radianto mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak. Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk memenuhi hak atas anak kembali berbuah apresiasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Republik Indonesia menobatkan Gresik sebagai Kabupaten Layak Anak dengan kategori madya. Penghargaan tersebut diterima langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise. Penyerahan penghargaan dilakukan pada malam puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2019 yang berlangsung di Hotel Four Point, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada akhir tahun 2020, Sambari Halim Radianto diganjar dua penghargaan Jer Basuki Mawa Beya dan Open Defecation Free (ODF) atau perilaku bebas buang air besar sembarangan di HUT ke 75 Provinsi Jawa Timur. Apresiasi penghargaan itu, diberikan sendiri oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Graha terkait atas diraihnya “Open Defecation Free” atau OFD. Berbagai penghargaan yang telah diraih Kabupaten Gresik pada masa Bupati Sambari Halim Radianto menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah mengalami perkembangan. Perkembangan ini berkaitan dengan pembangunan fisik dan juga non fisik yang telah dilakukan oleh Bupati Sambari Halim Radianto.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya Gresik terletak pada titik 7° 9',45" Lintang Selatan dan 112° 38',43" Bujur Timur. Gresik sebagai daerah kabupaten secara geografis berada antara 112° sampai 115' Bujur Timur dan 7° sampai 8' Lintang Selatan dengan luas Wilayah 1,174,07 km² yang mencakup daratan di Pulau Jawa seluas 977,80 km². Batas-batas wilayah Gresik yakni sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Selat Madura, di sebelah selatan Sidoarjo dan Mojokerto, di sebelah barat Lamongan.

Pada kepemimpinan Bupati Soefelan tahun 1973-1978 terjadi perubahan penataan di Lingkungan Kabupaten Gresik. Bupati Soefelan melakukan pemindahan pusat pemerintahan, rumah dinas bupati, dan seluruh kantor instansi yang ada. Kantor Pemda Gresik setelah dipindah menempati gedung eks Markas Komando Distrik Militer Gresik di Jalan Basuki Rahmat. Rumah dinas bupati, awalnya menempati gedung yang sekarang digunakan Gedung DPRD, kemudian dilakukan pemindahan di Kompleks Pendapa Kabupaten, yang mana sebelumnya merupakan Rumah Sakit Umum Gresik.

Pada awal jabatannya, Bupati Sambari Halim Radianto langsung percepatan program 100 hari pasca pelantikan yaitu, penataan Kabupaten Gresik, penanggulangan banjir kota, peningkatan sarana dan prasarana olah raga di kecamatan, program peningkatan pelayanan masyarakat Pulau Bawean dan peningkatan pelayanan penyeberangan kapal. Program 100 hari Bupati Sambari Halim Radianto berkaitan dengan pembangunan Wahana Ekspresi Poepongoro (WEP).

Pada masa Bupati Sambari Halim Radianto Halim tentu terdapat rumusan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Gresik. Rencana tata ruang wilayah ini termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Pada dasarnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. Selanjutnya, tata ruang

kecamatan berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan (RTDRK) yang bertujuan untuk penataan secara lokal di wilayah kecamatan. Pada prinsip RTRW juga menyangkut penataan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Gresik kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan wilayah terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung pemanfaatan ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Sambari Halim Radianto juga melakukan pembangunan berupa penanda Kota Gresik. *Landmark* pertama adalah Tugu Lontar yang terletak di Putat Luar, Sukorame, Kecamatan Gresik. Tugu Lontar ini diresmikan pada 7 Agustus 2019 pada pukul 20.30 WIB, Tugu Lontar memiliki tinggi 11,8 meter yang merupakan hibah dari PT Smelting Gresik sebuah perusahaan *smelter* asal negara Jepang. *Landmark* yang kedua adalah Tugu Gajah Mungkur yang terletak di sudut perempatan Sukorame, Gresik. Ada dua sudut tempat *landmark* ini dibangun. *Landmark* pertama ada di sudut belokan Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Usman Sadar. *Landmark* kedua ada di sudut atau jalan antara Jalan Dr. Soetomo dan Jalan Proklamasi.

Pasca pembangunan *landmark* terdapat beberapa polemik. Polemik ini seperti pada Tugu Gajah Mungkur, yang terkesan lucu karena patung gajah tidak mirip seperti gajah pada umumnya. Tugu Gajah Mungkur juga mendapat sorotan dari ahli waris Rumah Gajah Mungkur, yang mana Bupati Sambari tidak meminta izin dan rencana dalam pembangunan tugu dengan disain yang sama tersebut. Bupati Sambari juga mendapatkan komentar dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Salah satu Wakil Pimpinan DPRD Gresik Asluchul Alif berpendapat bahwa, setiap bentuk CSR yang didapat Pemkab Gresik harus lebih diutamakan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, demi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Gresik. Peningkatan perekonomian masyarakat dan urusan lebih mendesak dalam kesejahteraan masyarakat, seperti, untuk membayar BPJS kesehatan masyarakat kurang mampu dan belum ter-cover pemerintah, atau bisa juga untuk membayar biaya pendidikan anak kurang mampu yang berada (bersekolah) di swasta karena dampak zonasi yang tidak masuk di sekolah negeri.

Klarifikasi dari pihak Pemkab Gresik melalui Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Sekda Pemkab Gresik Ida Lailatussadiyah menyatakan bahwa pembangunan *landmark* yang sedang gencar dilakukan untuk keindahan kota. Pemkab Gresik meminta pihak perusahaan kesediaan mereka untuk membangun *landmark* yang telah disepakati, dengan tenaga pengerjaan dan bahan material langsung ditangani oleh pihak perusahaan. Sementara, Pemkab Gresik, hanya menyerahkan gambar desain *landmark* yang bakal dibuat kepada pihak perusahaan. "Pemkab Gresik dalam rangka menata keindahan kota mempunyai konsep-konsep mengenai nilai luhur dan sejarah, yang belum banyak diketahui orang itu harus diangkat. Supaya anak-cucu itu mengetahui sejarah yang ada di Kabupaten Gresik, dengan di tempatkan di lokasi strategis.

REFERENSI

Anak Agung Gde Putra Agung, I Gde Parimartha, Ida Bagus Gde Budharta, dan Ida Bagus Rama, 1986. Sejarah Kota Denpasar 1945-1979. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Basundoro, Purnawan. 2013. *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Surabaya 1900-1980- an. Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri.*
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press 1986.
- Hadi Sundoro, Mohammad , 2013, *Keniscayaan Sejarah Pengantar ke Arah Ilmu dan Metode Sejarah*, Jember: Jember Unity Press
- Masyhuroh, Intan Auliyatul. *Perkembangan Industri di Kabupaten Gresik Tahun 1996-2015. Skripsi Pada Program Study Pendidikan Sejarah, Universitas Jember 2019.*
- Muslimah,Aynul. 2016 ”Wabah Kolera di Jawa Timur Tahun 1918-1927”. Dalam AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 4, No. 3. Jurusan pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universita Negeri Surabaya
- Mustakim. 2010, *Gresik dalam Lintasan Lima Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Eureka.
- Pickard, Robert. *Policy and Law in Heritage Concervation*. London: Span Press. seperti dikutip Lalu Mulyadi dan Gaguk Sukowiyono dalam “Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang Sebagai Pusaka Kota (Urban Heritage) Pendekatam Persepsi Masyarakat”. Temu Ilmiah IPLBI 2014. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Ramdhani, Fanny. “Pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (Wep) dan MaknaPolitiknya Bagi Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto”. *Jurnal Politik Muda*, Vol 2 No.1. Januari-Maret 2012.
- Risqiana, Wildatul. “Penanganan Penyakit Lepra Masa Pemerintahan Hindia Belanda di Gresik Tahun 1936-1942”. Skripsi: Program Study Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. 2021.
- Roosmalen, Pauline K.M. “Awal Penataan Ruang di Indonesia”. dalam *Beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948-2000*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2003.
- Roosmalen, Pauline K.M. van *Sejarah Penataan Ruang di Indonesia*, dalam Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Indonesia. *Laporan Akhir Sejarah Penataan Ruang di Indonesia*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 2003.
- Sasmita, Nurhadi, 2012, et.all, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Jember: Lembah Manah
- Widodo, Dukut Imam. 2004, *Grissee Tempo Doeloe*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik